

Ketimpangan Pembangunan antara Kawasan Banten Utara dan Banten Selatan: Analisis Komparatif Indikator Ekonomi, Sosial, dan Infrastruktur

Hadi Wiguno ^{1 *}, Teguh Eko Saputro ², Muhammad Oka Mahendra ³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Sipil, Universitas Serang Raya, Jl. Raya Cilegon Drangong Serang - Banten No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162 Indonesia.

E-mail: muhammadoka81@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7482>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 09 Jul 2026

Revised: 15 Jul 2026

Accepted: 21 Jul 2026

Kata Kunci:

Ketimpangan Wilayah;
Banten Utara; Banten
Selatan; Indikator
Multidimensi;
Pembangunan Inklusif;
Disparitas Spasial.

Keywords:

Regional Inequality;
Northern Banten;
Southern Banten;
Multidimensional
Indicators; Inclusive
Development; Spatial
Disparity.



ABSTRACT

Provinsi Banten menyimpan paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi makro yang terus melaju sementara kesenjangan antarwilayah justru semakin melebar. Penelitian ini menganalisis secara komparatif ketimpangan pembangunan antara kawasan Banten Utara meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang dengan kawasan Banten Selatan yang terdiri dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, menggunakan tiga dimensi indikator secara terintegrasi: ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, serta merujuk pada kajian ilmiah yang telah melakukan analisis kuantitatif atas data yang sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa Banten Utara mendominasi sekitar 91 persen kontribusi PDRB provinsi, memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi, didukung infrastruktur yang lebih memadai, dan menjadi pusat konsentrasi industri modern. Sebaliknya, Banten Selatan tertinggal di seluruh dimensi: bergantung pada sektor primer bernilai tambah rendah, mencatat angka kemiskinan lebih tinggi, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang terbatas. Indeks Williamson yang dihitung oleh Suparta et al. (2026) dari data BPS secara konsisten berada pada kisaran 0,764–0,772 sepanjang 2020–2024, mengonfirmasi bahwa ketimpangan ini tergolong sangat tinggi dan cenderung divergen.

Banten Province presented a development paradox: strong aggregate economic growth accompanied by widening interregional disparities. This study comparatively analyzed development inequality between the Northern Banten region comprising Tangerang City, South Tangerang City, Tangerang Regency, Serang City, Cilegon City, and Serang Regency and the Southern Banten region, consisting of Pandeglang Regency and Lebak Regency, using three integrated indicator dimensions: economic, social, and infrastructure. A descriptive-comparative approach was applied based on secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Initial Draft of Banten Province RPJMD 2025–2029, supplemented by peer-reviewed studies conducting quantitative analyses of the same data. Results showed that Northern Banten dominated approximately 91 percent of provincial GRDP, recorded higher Human Development Index values, benefited from more adequate infrastructure, and served as the center of modern industrial concentration. Southern Banten lagged across all analyzed dimensions: dependent on low-value-added primary sectors, registering higher poverty rates, and having limited access to basic infrastructure. The Williamson Index calculated by Suparta et al. (2026) consistently ranged between 0.764 and 0.772 during 2020–2024, confirming that the inequality was very high and exhibited a divergent trend.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Hadi Wiguno, et al. (2026), Ketimpangan Pembangunan antara Kawasan Banten Utara dan Banten Selatan: Analisis Komparatif Indikator Ekonomi, Sosial, dan Infrastruktur, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7482>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang inklusif mensyaratkan tidak hanya pertumbuhan agregat yang tinggi, tetapi juga distribusi manfaat yang merata antarwilayah. Prinsip ini dinyatakan secara eksplisit dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya Tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan, maupun dalam kerangka RPJMN Indonesia. Namun, banyak daerah yang pertumbuhannya mengesankan secara agregat justru menyimpan kesenjangan antarwilayah yang dalam dan struktural bukan sekadar persoalan distribusi pendapatan, melainkan cerminan dari struktur ekonomi-spasial yang tidak seimbang (Todaro & Smith, 2015; Kuncoro, 2004).

Provinsi Banten merupakan representasi nyata dari paradoks tersebut. Sejak dimekarkan dari Jawa Barat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten berkembang pesat didorong posisi strategis yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku Banten mencapai Rp873,63 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,79 persen, melampaui rata-rata nasional. Namun di balik pencapaian makroekonomi tersebut, tersembunyi disparitas yang tajam antara dua kutub pembangunan dalam satu provinsi yang sama.

Ketimpangan ini membentuk pola dualisme yang tegas secara geografis. Kawasan Banten Utara mencakup Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang telah lama menjadi pusat konsentrasi industri pengolahan, properti, perdagangan, dan jasa modern. Sebaliknya, kawasan Banten Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Pada tahun 2021, kawasan utara berkontribusi 91,08 persen dari total PDRB provinsi, sementara selatan hanya 8,92 persen (Suparta et al., 2026). Dalam hal pendapatan per kapita, Kota Cilegon mencapai Rp248,4 juta sementara Kabupaten Lebak hanya Rp22,09 juta, rasio yang melampaui 11 .1.

Beberapa kajian terdahulu telah mengidentifikasi persoalan ini, namun sebagian besar terfokus pada satu dimensi analisis ketimpangan ekonomi (Waluya et al., 2024; Syaifudin et al., 2024) atau analisis sektor unggulan (Sutanti et al., 2022; Arum & Aminda, 2023) tanpa mengintegrasikan dimensi sosial dan infrastruktur dalam satu kerangka yang kohesif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membandingkan Banten Utara dan Banten Selatan melalui tiga dimensi secara simultan, menggunakan data terkini dari BPS dan RPJMD Provinsi Banten 2025–2029. Hasil ini diharapkan menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih komprehensif, sekaligus sebagai pilot study untuk penelitian tesis pada Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama . (1) Seberapa besar dan bagaimana pola ketimpangan pembangunan antara kawasan Banten Utara dan Banten Selatan dari dimensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara komparatif? (2) Faktor-faktor struktural apa yang mendorong persistensi ketimpangan tersebut, dan implikasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan sebagai langkah awal pemerataan pembangunan di Provinsi Banten?.

Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Myrdal (1957) melalui konsep cumulative causation berargumen bahwa pertumbuhan di satu wilayah bersifat kumulatif dan menarik faktor produksi dari wilayah sekitar melalui mekanisme backwash effect. Wilayah yang sudah maju terus menarik investasi dan tenaga kerja terampil, sementara wilayah pinggir semakin tertinggal. Pola ini relevan untuk memahami konsentrasi industri di koridor utara Banten. Williamson (1965) memperkenalkan hipotesis bahwa ketimpangan antarwilayah cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan kemudian berkurang seiring maturitas ekonomi pola kurva U-terbalik dalam konteks regional. Kondisi Banten tampaknya masih berada pada fase awal hipotesis tersebut, karena ketimpangan tidak hanya persisten tetapi cenderung meningkat (Suparta et al., 2026; Waluya et al., 2024).

Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan pada akhirnya melemahkan legitimasi kebijakan pembangunan dan memperburuk kemiskinan struktural. Kuncoro (2004) mengidentifikasi bahwa proses desentralisasi sejak 2001 belum sepenuhnya mengoreksi ketimpangan antarwilayah yang merupakan warisan dari pola pembangunan sentralistik Orde Baru argumen yang masih relevan untuk menjelaskan persistensi ketimpangan di Banten dua dekade kemudian. Sjafrizal (2018) mengidentifikasi empat determinan utama ketimpangan . perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis dan kualitas SDM, keterbatasan mobilitas barang dan jasa akibat infrastruktur yang tidak memadai, serta perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi. Keempat faktor ini hadir secara bersamaan dalam konteks Banten Utara–Banten Selatan.

Konseptualisasi Kawasan dan Penelitian Terdahulu

Pembagian kawasan Banten Utara dan Banten Selatan mencerminkan perbedaan karakteristik pembangunan yang telah mengakar. Banten Utara diuntungkan oleh kedekatan geografis dengan DKI Jakarta, konektivitas infrastruktur yang lebih matang, serta ekosistem industri yang terbangun sejak dekade 1980-an. Banten Selatan Pandeglang dan Lebak dicirikan oleh topografi berbukit-pegunungan, ketersediaan lahan pertanian yang luas, serta posisi geografis yang jauh dari pusat pertumbuhan. Perbedaan ini diakui secara resmi dalam RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, yang menyebutkan bahwa konsentrasi ekonomi di wilayah utara merupakan faktor utama disparitas IPM antarwilayah (Pemerintah Provinsi Banten, 2025).

Waluya et al. (2024) mengidentifikasi tiga akar permasalahan ketimpangan di Banten . kesenjangan konektivitas infrastruktur, kesenjangan kualitas SDM, dan ketidakseimbangan distribusi investasi. Syaifudin et al. (2024), menggunakan Indeks Entropi Intra Theil, menemukan bahwa Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Serang merupakan wilayah dengan konsentrasi ekonomi yang jauh melampaui daerah lain, serta bahwa Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki karakteristik serupa dalam struktur ekonomi berbasis sektor agrikultur. Suparta et al. (2026), menggunakan Indeks Williamson, Location Quotient, Tipologi Klassen, dan Shift Share Analysis dari data BPS 2020–2024, menemukan nilai Williamson yang secara konsisten di atas 0,76 dengan tren divergen menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi justru memperparah ketimpangan. Ketiga kajian tersebut memberikan landasan kuantitatif yang kuat, namun belum secara eksplisit membingkai ketimpangan dalam perspektif kawasan Utara vs. Selatan dengan pendekatan multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara bersama. Penelitian ini mengisi celah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan basis data sekunder. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi masing-masing kawasan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi Banten Utara dan Banten Selatan secara sistematis. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah pemetaan kondisi dan pola ketimpangan, bukan pengujian hipotesis kausal secara statistik. Tidak dilakukan perhitungan kuantitatif baru dalam penelitian ini; yang dilakukan adalah sintesis, interpretasi, dan reframing data dalam kerangka komparatif Utara–Selatan.

Unit analisis adalah kawasan pembangunan dalam Provinsi Banten, yang dikelompokkan sebagai berikut . (1) Banten Utara . Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang; (2) Banten Selatan . Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Pengelompokan ini mengacu pada pembagian wilayah pembangunan yang lazim digunakan dalam dokumen perencanaan daerah Provinsi Banten.

Seluruh data yang digunakan adalah data sekunder dari . (1) publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (2) Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten 2025–2029; (3) kajian ilmiah terindeks Suparta et al. (2026) dan Syaifudin et al. (2024) yang keduanya mengolah data BPS secara kuantitatif dan digunakan hasilnya sebagai data sekunder. Periode data utama adalah 2020–2024, dengan data historis 2013–2023 digunakan untuk analisis tren pada beberapa indikator. Hasil analisis kuantitatif dari penelitian terdahulu Indeks Williamson, Location Quotient, Shift Share, dan Tipologi Klassen dikutip sebagai data pembanding, bukan sebagai metode yang diterapkan ulang dalam penelitian ini.

Tiga kelompok indikator digunakan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Indikator Penelitian dan Sumbernya

Dimensi	Indikator	Satuan	Sumber Data
Ekonomi	PDRB per kapita (ADHK & ADHB)	Juta Rp/jiwa	BPS; Suparta et al. (2026)
	Kontribusi PDRB terhadap provinsi	Persen (%)	Suparta et al. (2026)
	Komposisi sektoral PDRB	Persen (%)	BPS; Suparta et al. (2026)
	Jumlah unit industri	Unit	RPJMD Banten (2025)
	Indeks Williamson (referensi)	Indeks (0–1)	Suparta et al. (2026)

Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	BPS; RPJMD Banten (2025)
	Tingkat kemiskinan	Persen (%)	BPS
	Gini Ratio pengeluaran	Rasio	BPS Banten (2025)
Infrastruktur	Akses air minum layak	Persen (%)	RPJMD Banten (2025)
	Sanitasi layak & aman	Persen (%)	BPS/RPJMD Banten (2025)
	Rasio elektrifikasi	Persen (%)	RPJMD Banten (2025)
	Kepadatan kawasan industri & investasi	Deskriptif	RPJMD Banten (2025); DPMPTSP (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dua Kawasan

Banten Utara dan Banten Selatan memiliki profil yang sangat berbeda sejak terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000. Banten Utara dengan enam kabupaten/kotanya diuntungkan oleh kedekatan geografis dengan DKI Jakarta, jaringan infrastruktur yang lebih matang, serta ekosistem industri yang telah terbangun lama. Kawasan ini menjadi bagian dari koridor industri yang membentang dari Tangerang Raya hingga kawasan industri Cilegon–Serang sebuah warisan investasi yang dibangun sejak dekade 1980-an. Sebaliknya, Banten Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dicirikan oleh topografi berbukit-pegunungan dan bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam, yang hingga kini belum tertransformasi menjadi nilai tambah ekonomi yang signifikan karena keterbatasan akses, infrastruktur, dan investasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Dimensi Ekonomi

PDRB Per Kapita dan Kontribusi Wilayah

Perbedaan PDRB per kapita antara dua kawasan ini merupakan yang paling mencolok di antara seluruh indikator. Berdasarkan data BPS yang diolah oleh Suparta et al. (2026), PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2024 menunjukkan disparitas yang ekstrem (Tabel 2). Kota Cilegon memiliki PDRB per kapita lebih dari 11 kali lipat Kabupaten Lebak pada tahun 2024. Bahkan kabupaten/kota Banten Utara dengan nilai terendah Kabupaten Tangerang (Rp33,53 juta) masih dua kali lebih tinggi dari kabupaten-kabupaten di Banten Selatan. Jika dihitung menggunakan harga berlaku (ADHB), rasio Cilegon–Lebak mencapai 11 .1 (Rp248,4 juta berbanding Rp22,09 juta). Yang lebih mengkhawatirkan adalah sifat divergennya . PDRB per kapita Kota Cilegon tumbuh dari Rp168,59 juta (2020) menjadi Rp194,36 juta (2024), sementara Kabupaten Lebak hanya bergerak dari Rp14,87 juta menjadi Rp16,13 juta mengindikasikan bahwa celah antarwilayah terus melebar. Dari sisi kontribusi agregat, kawasan Banten Utara menyumbang 91,08 persen dari total PDRB Provinsi Banten pada tahun 2021, sementara Banten Selatan hanya 8,92 persen (Suparta et al., 2026).

Tabel 2. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020–2024 (Harga Konstan 2010, Juta Rp/Jiwa)

Kawasan	Kabupaten/Kota	2020	2022	2024	Kategori
Banten Utara	Kota Cilegon	168,59	181,23	194,36	Sangat Tinggi
	Kota Tangerang	54,03	58,37	63,68	Tinggi
	Kota Tangerang Selatan	43,96	47,88	52,18	Tinggi
	Kabupaten Serang	32,58	34,68	37,17	Menengah-Tinggi
	Kota Serang	32,54	34,40	36,55	Menengah-Tinggi
	Kabupaten Tangerang	28,80	31,07	33,53	Menengah
Banten Selatan	Kabupaten Pandeglang	15,33	16,02	16,54	Sangat Rendah
	Kabupaten Lebak	14,87	15,59	16,13	Sangat Rendah

Sumber . Suparta et al. (2026), diolah dari BPS Provinsi Banten.

Struktur Sektoral dan Indeks Williamson

Ketimpangan ekonomi berakar dari perbedaan struktur sektoral yang mendasar. Sektor Industri Pengolahan mendominasi PDRB provinsi dengan kontribusi 33,55 persen tahun 2024, terkonsentrasi di kawasan industri Cilegon (petrokimia, baja), Tangerang Raya (elektronik, alas kaki, otomotif), dan Serang (aneka industri). Berdasarkan perhitungan Static Location Quotient oleh Suparta et al. (2026), Industri Pengolahan merupakan sektor basis Banten dengan LQ rata-rata 1,636 selama 2020–2024.

Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan non-basis dengan LQ rata-rata 0,443 dan pertumbuhan yang lebih lambat (Suparta et al., 2026; Syaifudin et al., 2024). Data RPJMD 2025–2029 memperlihatkan perbedaan mencolok dalam jumlah unit industri . Kabupaten Pandeglang hanya 13 unit dan Kabupaten Lebak 42 unit, berbanding sangat jauh dengan Kabupaten Tangerang yang memiliki 1.926 unit (Pemerintah Provinsi Banten, 2025).

Hasil analisis Tipologi Klassen oleh Syaifudin et al. (2024) menggunakan data 2013–2023 menempatkan seluruh kabupaten Banten Selatan pada Kuadran IV (daerah relatif tertinggal) dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang sama-sama di bawah rata-rata provinsi. Di sisi lain, kabupaten/kota Banten Utara menempati kuadran yang lebih menguntungkan . Kota Tangerang Selatan (Kuadran I . maju dan cepat tumbuh), Kota Tangerang dan Kota Cilegon (Kuadran II . maju tetapi tertekan), serta Kabupaten Tangerang dan Kota Serang (Kuadran III . berkembang cepat atau berpotensi). Secara keseluruhan, ketimpangan antarwilayah di Provinsi Banten tergolong sangat tinggi, sebagaimana dikonfirmasi oleh Indeks Williamson yang dihitung oleh Suparta et al. (2026) (Tabel 3).

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2020–2024.

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Williamson	0,7643	0,7637	0,7683	0,7694	0,7717

Sumber . Suparta et al. (2026), diolah dari BPS Provinsi Banten.

Nilai Indeks Williamson yang secara konsisten berada di atas 0,76 jauh melampaui ambang 0,50 yang dianggap sebagai batas ketimpangan tinggi dalam literatur ekonomi regional (Williamson, 1965; Sjafrizal, 2018). Tren divergen ini menyiratkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi tidak mendorong pemerataan; sebaliknya, pemulihan yang terkonsentrasi di sektor industri pengolahan di Banten Utara justru memperlebar jurang antara kedua kawasan.

Dimensi Sosial

Ketimpangan ekonomi yang tajam tercermin dalam disparitas IPM antarwilayah. IPM Provinsi Banten secara keseluruhan mencapai 76,35 pada tahun 2024 (meningkat dari 74,41 pada 2020). Namun angka rata-rata provinsi ini menyembunyikan kesenjangan yang signifikan . Kota Tangerang Selatan mencatat IPM tertinggi sebesar 84,16 (kategori sangat tinggi), diikuti Kota Tangerang dengan 81,53 keduanya di Banten Utara. Sebaliknya, Kabupaten Lebak merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Banten yang masih masuk kategori IPM "sedang" dengan nilai 68,33 pada tahun 2024 kategori yang sama dengan banyak daerah tertinggal di luar Pulau Jawa. Data IPM per kabupaten/kota yang tersedia disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Banten, 2020–2024.

Kawasan	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Banten		74,41	74,68	75,25	75,77	76,35
Banten Utara	Kota Tangerang Selatan					84,16
	Kota Tangerang					81,53
	Kabupaten Serang			71,99	72,63	
Banten Selatan	Kabupaten Lebak					68,33

Sumber . BPS Provinsi Banten (2024, 2025); Pemerintah Provinsi Banten (2025). Keterangan . " " menandakan data tidak tersedia dalam sumber yang digunakan.

Data tingkat kemiskinan menunjukkan pola serupa. Pada tahun 2022, Kabupaten Pandeglang mencatat tingkat kemiskinan 9,32 persen dan Kabupaten Lebak 8,91 persen, sementara Kabupaten Tangerang 6,92 persen dan Kabupaten Serang 4,96 persen (Tabel 5). Gini Ratio provinsi pada September 2024 tercatat sebesar 0,389 angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran yang cukup tinggi. Kondisi ini diperparah oleh kerentanan bencana multidimensional meliputi banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan kekeringan yang secara eksplisit diidentifikasi RPJMD Banten 2025–2029 sebagai faktor yang paling terkonsentrasi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Bencana berulang merusak aset produktif masyarakat yang belum memiliki buffer ekonomi yang memadai.

Tabel 5. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Banten, 2020–2023 (Persen)

Kawasan	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
---------	----------------	------	------	------	------

Provinsi Banten		6,16	6,17
Banten Utara	Kabupaten Tangerang	6,23	7,12
	Kabupaten Serang	4,96	4,80
Banten Selatan	Kabupaten Pandeglang	9,92	10,72
	Kabupaten Lebak	9,24	10,29

Sumber . BPS (2020–2024), diolah dari berbagai publikasi. Keterangan . " " menandakan data tidak tersedia dalam sumber yang digunakan.

Dimensi Infrastruktur

Provinsi Banten secara keseluruhan mencatat capaian akses air minum layak sebesar 94,01 persen pada tahun 2024 terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa (Pemerintah Provinsi Banten, 2025). Data per kabupaten/kota tahun 2023 (Tabel 6) memperlihatkan jurang yang sangat lebar . Kabupaten Lebak memiliki akses terendah (73,32%), diikuti Kabupaten Pandeglang (82,01%), sementara kabupaten/kota di Banten Utara mencatat angka di atas 92%. Untuk sanitasi layak tahun 2022, Kabupaten Pandeglang hanya 49,11 persen dan Kabupaten Lebak 56,82 persen, sementara Kota Tangerang Selatan mencapai 98,84 persen. Bahkan untuk sanitasi aman, Kabupaten Pandeglang hanya mencatat 0,77 persen, berbanding 21,75 persen di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 6. Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kawasan	Kabupaten/Kota	Air Minum Layak 2023 (%)	Sanitasi Layak 2022 (%)	Sanitasi Aman 2022 (%)
Banten Utara	Kota Cilegon	98,72	97,07	14,40
	Kota Serang	98,38	90,76	11,06
	Kabupaten Tangerang	97,97	85,89	10,32
	Kabupaten Serang	92,33	80,34	4,36
	Kota Tangerang Selatan		98,84	21,75
Banten Selatan	Kabupaten Pandeglang	82,01	49,11	0,77
	Kabupaten Lebak	73,32	56,82	3,40

Sumber . BPS (2023, 2022) melalui dokumen SDA PUPR (2024). Keterangan . " " menandakan data tidak tersedia dalam sumber yang digunakan.

Dari sisi kelistrikan, RPJMD 2025–2029 mengungkap bahwa satu-satunya wilayah yang masih mencatat rumah tangga belum berlistrik adalah Kabupaten Lebak (498 rumah tangga, berdasarkan data baseline PLN 2022). Meskipun jumlahnya kecil secara absolut, fakta bahwa defisit ini terpusat eksklusif di Banten Selatan merupakan indikator simbolis dari keteringgalan infrastruktur dasar.

Konsentrasi infrastruktur industri di Banten Utara sangat dominan. Kawasan industri besar Kawasan Industri Millenium di Tangerang, Kawasan Industri Krakatau di Cilegon, hingga berbagai kawasan industri di Serang Utara seluruhnya berada di Banten Utara, didukung infrastruktur transportasi yang lebih lengkap . Pelabuhan Merak, Bandara Soekarno-Hatta, dan jaringan jalan tol terintegrasi. Data realisasi investasi periode Januari–September 2024 dari DPMPSTSP Provinsi Banten menunjukkan ketimpangan yang sangat ekstrem . Kota Cilegon menyerap Rp29,81 triliun, Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, dan Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, sementara Kabupaten Lebak hanya Rp1,30 triliun dan Kabupaten Pandeglang Rp0,596 triliun. Banten Selatan (Lebak + Pandeglang) hanya menyerap sekitar 2,27 persen dari total investasi, sementara Banten Utara menyerap hampir 98 persen.

Sintesis Komparatif

Berdasarkan analisis tiga dimensi di atas, profil ketimpangan antara Banten Utara dan Banten Selatan disajikan pada Tabel 7. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan bersifat multidimensional dan saling memperkuat . rendahnya PDRB per kapita di Banten Selatan membatasi kemampuan fiskal daerah untuk membangun infrastruktur; terbatasnya infrastruktur menyulitkan masuknya investasi; minimnya investasi menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas; dan rendahnya kualitas SDM mempersulit transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi.

Lingkaran kumulatif ini persis menggambarkan mekanisme backwash effect yang dikemukakan Myrdal (1957), yang dalam konteks Banten telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Tabel 7. Perbandingan Profil Pembangunan Banten Utara dan Banten Selatan

Dimensi	Indikator Kunci	Banten Utara	Banten Selatan
Ekonomi	PDRB per kapita ADHK (2024)	Rp33,5–194,4 juta	Rp16,1–16,5 juta
	PDRB per kapita ADHB (2024)	Rp248,4 juta (Cilegon)	Rp22,09 juta (Lebak)
	Kontribusi PDRB (2021)	~91%	~9%
	Struktur ekonomi dominan	Industri modern, jasa	Pertanian tradisional
	Indeks Williamson 2020–2024	0,764–0,772 (sangat tinggi, divergen)	
Sosial	IPM (2024)	81,53–84,16	68,33 (sedang)
	Tingkat kemiskinan (2022)	4,96–6,92%	8,91–9,32%
	Kerentanan bencana	Sedang	Tinggi (multibencana)
Infrastruktur	Akses air minum layak (2023)	92,33–98,72%	73,32–82,01%
	Sanitasi layak (2022)	80,34–98,84%	49,11–56,82%
	Elektrifikasi	Lengkap (100%)	Ada defisit (498 RT di Lebak)
	Realisasi investasi (Jan–Sep 2024)	~97,73%	~2,27%

Sumber . Diolah dari BPS, RPJMD Banten 2025–2029, Suparta et al. (2026), Syaifudin et al. (2024), DPMPSTP Banten (2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, ketimpangan antara kawasan Banten Utara dan Banten Selatan bersifat struktural, multidimensional, dan persisten. Nilai Indeks Williamson yang secara konsisten di atas 0,76 selama 2020–2024 dengan tren divergen (Suparta et al., 2026) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten yang impresif belum inklusif secara spasial. Kawasan selatan tidak menikmati limpahan pertumbuhan dari utara secara proporsional. Kedua, ketimpangan tersebut berakar pada perbedaan basis ekonomi yang fundamental: Banten Utara telah mencapai tahap industrialisasi yang relatif matang dengan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, sementara Banten Selatan masih dalam tataran ekonomi primer yang tumbuh lambat. Transformasi struktural di Banten Selatan terhambat oleh kombinasi keterbatasan infrastruktur, investasi yang minim, dan kualitas SDM yang belum memadai ketiganya saling mengunci dalam siklus ketertinggalan yang kumulatif. Ketiga, analisis tiga dimensi secara konsisten mengidentifikasi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagai wilayah yang tertinggal di seluruh aspek yang diukur. Kesamaan karakteristik kedua kabupaten ini yang dikonfirmasi pula oleh analisis Multidimensional Scaling dalam Syaifudin et al. (2024) membuka peluang pendekatan kebijakan berbasis kluster untuk kedua daerah tersebut.

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan empat arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, percepatan konektivitas infrastruktur Banten Selatan. Pembangunan atau peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan Pandeglang dan Lebak dengan koridor ekonomi utara merupakan prasyarat bagi investasi dan mobilitas ekonomi. RPJMD Banten 2025–2029 telah mengidentifikasi ini sebagai prioritas, namun implementasinya perlu diperkuat dengan alokasi anggaran yang lebih afirmatif dan mekanisme pemantauan yang jelas. Kedua, pengembangan agribisnis berbasis komoditas lokal. Potensi pertanian dan perkebunan di Banten Selatan perlu didorong naik rantai nilai melalui fasilitasi industri pengolahan skala menengah, akses pasar, dan dukungan teknologi pertanian. Pendekatan ini lebih realistis dalam jangka pendek dibandingkan upaya industrialisasi penuh yang membutuhkan investasi besar dan waktu panjang. Ketiga, penguatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi. Surplus tenaga kerja yang belum terserap secara produktif di Banten Selatan perlu ditransformasi

melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal baik berbasis pertanian modern maupun sektor jasa yang dapat berkembang seiring peningkatan infrastruktur. Keempat, desain transfer fiskal yang lebih afirmatif. Kapasitas fiskal Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang terbatas perlu dikompensasi melalui mekanisme transfer antardaerah baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana pembangunan provinsi yang secara eksplisit memprioritaskan pengurangan ketimpangan antar wilayah, bukan sekadar mendistribusikan secara proporsional berdasarkan ukuran populasi.

Sebagai pilot study, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Penggunaan pendekatan deskriptif-komparatif berarti penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan kausal secara statistik ketimpangan diidentifikasi dan dideskripsikan, tetapi faktor penjelasnya belum diuji secara formal. Selain itu, pembagian Banten Utara-Selatan belum sepenuhnya mencerminkan heterogenitas internal masing-masing kawasan: Banten Utara sendiri sangat beragam, mulai dari Kota Cilegon yang sangat industri hingga sebagian Kabupaten Serang yang masih agraris.

Beberapa data masih belum tersedia secara lengkap dalam sumber yang digunakan. Data IPM untuk Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang untuk seluruh periode 2020–2024 tidak tersedia; data tingkat kemiskinan untuk tahun 2023–2024 di sebagian besar kabupaten/kota juga belum diperoleh; data akses air minum dan sanitasi untuk tahun 2024 belum terpilah; dan data investasi untuk tahun 2020–2023 per kabupaten/kota belum ditemukan. Keterbatasan ini berarti analisis di beberapa bagian bersifat deskriptif parsial dan memerlukan pelengkapan data dari publikasi BPS dan instansi terkait untuk penelitian lebih lanjut. Terakhir, dimensi tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Banten Selatan belum dijamah, padahal faktor ini mungkin turut berkontribusi pada ketertinggalan (Rustiadi et al., 2012).

Keterbatasan-keterbatasan ini membuka beberapa agenda riset yang relevan untuk dikembangkan pada level tesis:

1. Analisis kausalitas ketimpangan menggunakan model panel data atau regresi spasial untuk menguji faktor-faktor penentu secara statistik, termasuk variabel infrastruktur, investasi, kualitas SDM, dan desentralisasi fiskal.
2. Analisis spasial menggunakan pendekatan spatial econometrics (Moran's I, LISA) untuk membuktikan secara formal apakah konsentrasi ekonomi di Banten Utara memiliki efek spillover positif atau justru backwash negatif terhadap Banten Selatan.
3. Evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui analisis efektivitas DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), dan program pembangunan provinsi dalam mereduksi ketimpangan, menggunakan data realisasi APBD periode terbaru.
4. Studi transformasi ekonomi di Banten Selatan melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan kunci, untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan yang menyebabkan sektor pertanian belum berkembang menjadi agribisnis bernilai tambah.

Pengembangan indeks ketimpangan multidimensi yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara bersamaan sebagai alat monitoring kebijakan yang lebih komprehensif dari pendekatan indeks tunggal yang tersedia saat ini..

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten, dan semua pihak yang telah menyediakan data dan dokumen perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini. Naskah ini merupakan pilot study untuk penelitian tesis pada Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung.

REFERENSI

- Arum, N. S., & Aminda, R. S. (2023). Analisis sektor unggulan dan potensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2015–2019. *Journal of Development Economic and Digitalization*, 2(2), 21–32.

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik air minum dan sanitasi 2022.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik air minum dan sanitasi 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025a). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2024. <https://banten.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025b). Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten, September 2024.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. (2024). Realisasi investasi Provinsi Banten periode Januari–September 2024.
- Hevanda, L., & Mahendra, M. O. (2025). Pemilihan moda transportasi umum Cilegon–Merak menggunakan metode analytic hierarchy process. *Jurnal Konstruksi*, 23(1), 87–96.
- Holiansyah, & Mahendra, M. O. (2025). Analisis kebutuhan gardu tol berdasarkan teori antrian dan proyeksi volume lalu lintas. *Jurnal Konstruksi*, 23(2), 92–103. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.23-2.2432>
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang. Erlangga.
- Mahendra, M. O., & Djuneydi, M. (2025). Analisis faktor pengaruh penerapan smart transportation berbasis persepsi publik. *Jurnal Konstruksi*, 23(1), 27–33.
- Mahendra, M. O., & Silalahi, R. M. (2025). Analisis komparatif kinerja lalu lintas PKJI 2023 dan VISSIM di persimpangan Serdang. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 14(2), 240–249.
- Myrdal, G. (1957). Economic theory and underdeveloped regions. Duckworth.
- Oktaviani, A. N., & Mahendra, M. O. (2025). Evaluation of multimodal transportation integration facilities at Serang station. *Journal of Infrastructure Planning and Engineering*, 4(2), 72–82.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2025). Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2025–2029. Bappeda Provinsi Banten.
- Pratidina, G., & Mahendra, M. O. (2026). Modeling commuter mode shift to electric railway services: An integrated performance analysis and stated preference approach for the Rangkasbitung–Merak line. *Journal of Infrastructure Planning and Engineering*, 5(1), 23–32.
- Putrinur, S. I., & Mahendra, M. O. (2025). Analisis pengaruh kinerja lalu lintas terhadap biaya operasional kendaraan menggunakan metode MKJI 1997. *Jurnal Konstruksi*, 23(1), 67–75. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.23-1.2281>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2012). Perencanaan dan pengembangan wilayah (Cet. 3). Crestpent Press & Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafrizal. (2018). Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Suparta, I. W., Hasanah, N. R., Lestari, I. D., Pratiwi, D., Ramadhani, S., Laurensia, J., & Putri, A. Z. D. (2026). Analisis struktur ekonomi, daya saing sektoral, dan ketimpangan wilayah di Provinsi Banten tahun 2020–2024. *Jurnal Edu Research*, 7(2), 2889–2903.
- Sutanti, Munawaroh, A., & Hakim, L. (2022). Analisis sektor unggulan Provinsi Banten dengan metode location quotient dan shift share. *Media Ekonomi*, 30(1), 89–108. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10285>
- Syaifudin, R., Mangara, T. H., Desmawan, D., Julliansyah, M. R., Putri, C. S. A., & Mahintan, L. Z. (2024). Karakteristik ketimpangan Provinsi Banten: Pendekatan struktur ekonomi, Indeks Entropi Theil, dan multidimensional scaling. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(3), 311–321. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5902>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson Education.
- Waluya, M. R., Hidayat, J. T., & Waskitaningsih, N. (2024). Arah pengembangan untuk mengurangi ketimpangan wilayah antarkabupaten/kota di Provinsi Banten. *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota*, 1(1), 1–13.
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 3–45. <https://doi.org/10.1086/450136>
- Zakiudin, M. A., Mahendra, M. O., & Wiguno, H. (2026). Evaluasi kinerja lalu lintas pada simpang tak bersinyal menggunakan metode PKJI 2023 (studi kasus simpang Jl. Mayor Muslich–Jl. Empat Lima Kota Serang, Banten). *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 15(1), 65–72